

**PENGARUH PENGELOLAAN PROGRAM DAUR ULANG SAMPAH
TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
DI RW 01 DESA BENTENG KECAMATAN CIAMPEA
KABUPATEN BOGOR**

**Drs. Abdul Karim Halim, M.Si
Sutinah, S.Pd.**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi tentang; 1) Pengelolaan Program Daur Ulang sampah, 2) Tingkat Kesejahteraan Keluarga dan 3) Pengaruh Pengelolaan Program Daur Ulang Sampah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Keluarga di Rw 01 Desa Benteng Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor. Dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan teknik penelitian berupa angket, observasi, wawancara dan studi pustaka. Penelitian ini dilakukan terhadap 30 orang kepala keluarga yang menjadi populasi sekaligus sampel dalam penelitian ini, keseluruhan kepala keluarga yang mengikuti program daur ulang sampah di Rw 01 Desa Benteng Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor.

Pengelolaan daur ulang sampah ini dilakukan melalui sistem 3 R (*Reuse, Reduce and Recycle*) dengan harapan dari sampah yang biasanya membawa masalah, saat ini dapat menjadi berkah.

Dari hasil pengolahan data didapat koefisien korelasi (r_{hitung}) sebesar 0,51. Jika dikonsultasikan kepada tabel harga kritik dari r product moment, nilai $0,511 > 0,463$ pada taraf signifikan 99 %. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan H_0 **ditolak** dan H_1 **diterima**, artinya ada pengaruh yang signifikan dari pengelolaan daur ulang sampah terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga. Dalam menguji hipotesis digunakan statistik uji-t yang menunjukkan hasil, harga t_{hitung} sebesar 3,14. Setelah dikonsultasikan pada nilai persentil distribusi t diketahui bahwa t_{hitung} lebih besar dari pada t_{tabel} ($3,14 > 2,47$). Dengan kesimpulan H_0 **ditolak** dan H_1 **diterima**, yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan dari program daur ulang sampah terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga di Rw 01 Desa Benteng Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor. Sedangkan harga koefisien determinasi diperoleh sebesar 26 %, yang artinya pengaruh pengelolaan program daur ulang sampah terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga di Rw 01 Desa Benteng Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor sebesar 26 % dan sisanya 74 % dijelaskan oleh faktor lain.

Kata Kunci : Daur Ulang Sampah, 3 R, Peningkatan Pendapatan Keluarga.

I. PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang Masalah.

Banyaknya sampah yang dihasilkan dari suatu daerah sebanding dengan jumlah penduduk, jenis aktivitas, dan tingkat konsumsi penduduk tersebut terhadap barang/material. Semakin besar jumlah penduduk dan / tingkat konsumsi terhadap barang, maka semakin besar pula volume sampah yang dihasilkan. Menurut *World Health Organization* (WHO), dalam Chandra (2006 : 12) sampah adalah “sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya” .

Pengelolaan sampah yang benar mensyaratkan adanya keterpaduan dari berbagai aspek, mulai dari hulu sampai hilir. Aspek hulu meliputi kegiatan pengolahan sampah pada tingkat penghasil sampah tahap pertama, diantaranya rumah tangga. Langkah yang bisa diambil pada aspek hulu adalah pemilahan sampah berdasarkan jenisnya. Sampah dipilah menjadi tiga, yaitu sampah organik, anorganik dan B3 (Berbau, Beracun dan Berbahaya). Sebagai contoh, tempat sampah yang berwarna hijau untuk sampah organik, merah untuk anorganik, dan biru untuk B3 (Berbau, Beracun dan Berbahaya). Sampah yang dibiarkan menggunung dan tidak diproses bisa menjadi sumber penyakit.

Banyak potensi yang dapat dihasilkan dari sampah, diantaranya untuk menimbun lahan yang berawa dan dataran rendah, untuk pupuk, dan didaur ulang sehingga dapat diperoleh keuntungan dari berbagai kegiatan tersebut. Penanganan sampah tak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah, diperlukan peran aktif seluruh masyarakat, setidaknya dalam memilah dan memisah sampah. Diperlukan pula kreatifitas/inovasi dan dukungan teknologi untuk memaksimalkan perlakuan sampah. Permasalahan sampah berhubungan erat dengan jumlah dan karakter penduduk. Makin banyak penduduk di suatu tempat, maka semakin banyak sampah yang akan dihasilkan. Saat ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai masalah. Pendapat tersebut tidak salah, bila mereka belum mampu mengelola sampah dengan baik

dan benar. Pengelolaan sampah rumah tangga yang baik dan benar dengan sistem 3 R (*Reduce, Reuse dan Recycle*).

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Penelitian ini dibatasi hanya pada hal-hal yang berhubungan dengan :

1. Pengelolaan Program Daur Ulang Sampah di Rw 01 Desa Benteng Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor.
2. Tingkat Kesejahteraan Keluarga di Rw 01 Desa Benteng Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor.
3. Pengaruh Pengelolaan Program Daur Ulang Sampah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Keluarga di Rw 01 Desa Benteng Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor.

Untuk memberi arah terhadap masalah yang akan diteliti, maka penulis merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana Pengaruh Pengelolaan Program Daur Ulang Sampah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Keluarga di Rw 01 Desa Benteng Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor”?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk memperoleh data dan informasi tentang :

1. Pengelolaan program daur ulang sampah di Rw 01 Desa Benteng Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor.
2. Tingkat kesejahteraan keluarga di Rw 01 Desa Benteng Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor.
3. Pengaruh pengelolaan program daur ulang sampah terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga di Rw 01 Desa Benteng Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor.

II. Pembahasan

A. Model Pengelolaan Program Daur Ulang Sampah

1. Pengertian Pengelolaan Daur Ulang Sampah

Setiap kegiatan daur ulang sampah memerlukan program pengelolaan, agar kegiatan tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengelolaan atau manajemen adalah kemampuan dan keterampilan khusus

untuk melakukan suatu kegiatan, baik bersama orang lain atau melalui orang lain dalam mencapai tujuan organisasi. Hersey dan Blanchard dalam Djuju Sudjana (2010 : 17) memberi arti pengelolaan sebagai berikut. "*Management as working with and through individual and group to accomplish organizational goals* (pengelolaan merupakan kegiatan yang dilakukan bersama dan melalui orang-orang serta kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi)".

Sementara itu, yang dimaksud dengan pengelolaan sampah menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah (Afifudin, 2003 : 56) dinyatakan bahwa : "Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah". Dalam hubungannya dengan program daur ulang sampah, Afifudin (2003 : 78) menyatakan :

Daur ulang sampah adalah sebagai suatu hasil aktivitas yang sudah tidak dipakai lagi atau dianggap sudah tidak memiliki nilai ekonomi seperti yang dihasilkan dari bahan-bahan nonhayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang, menjadi sesuatu yang mamiliki nilai ekonomi lagi. Daur ulang merupakan proses untuk menjadikan suatu bahan bekas menjadi bahan baru dengan tujuan mencegah adanya sampah yang sebenarnya dapat menjadi sesuatu yang berguna, mengurangi penggunaan bahan baku yang baru, mengurangi penggunaan energi, mengurangi polusi, kerusakan lahan, jika dibandingkan dengan proses pembuatan barang baru.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan program daur ulang sampah adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama sebagai bentuk kerja organisasi dalam mencapai tujuan yang menyangkut aspek teknis dan aspek nonteknis, seperti bagaimana mengorganisir, membiayai dan melibatkan masyarakat penghasil limbah agar ikut berpartisipasi secara aktif dalam aktivitas penanganan daur ulang sampah.

2. Tujuan Pengelolaan Program Daur Ulang Sampah

Pengelolaan program daur ulang sampah pada umumnya bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pengelola kebersihan hidup keluarga dan lingkungan, program inipun bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengelolaan daur ulang sampah sehingga memberikan

manfaat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka. Hal ini diperkuat oleh Sudrajat (2006 : 56) yang menyatakan : a) Mengubah sampah menjadi material yang memiliki nilai ekonomis, b) Mengolah sampah agar menjadi material yang tidak membahayakan bagi lingkungan bagi lingkungan hidup. Dengan demikian, tujuan program pengelolaan sampah adalah mengubah dan mengelola sampah agar berdaya guna dan memiliki nilai ekonomi.

3. Strategi Pengelolaan Program Daur Ulang Sampah

Konsep 3R (*Reuse, Reduce and Recycle*) adalah paradigma baru dalam pola konsumsi dan produksi disemua tingkatan dengan memberikan prioritas tertinggi pada pengelolaan sampah yang berorientasi pada pencegahan timbunan sampah, minimalisasi sampah dengan mendorong barang yang dapat digunakan lagi dan barang yang dapat didekomposisi secara biologi (*biodegradable*) dan penerapan pembuangan sampah yang ramah lingkungan.

Pelaksanaan 3R (*Reuse, Reduce and Recycle*) tidak hanya menyangkut masalah sosial dalam rangka mendorong perubahan sikap dan pola pikir menuju terwujudnya masyarakat yang ramah lingkungan dan berkelanjutan tetapi juga menyangkut pengaturan (manajemen) yang tepat dalam pelaksanaannya. Menurut Permen PU No.21/PRT/M/2006 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- a. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan, yang selanjutnya disingkat KSNP-SPP merupakan pedoman untuk pengaturan penyelenggaraan dan pengembangan sistem pengelolaan persampahan, baik bagi pemerintah pusat, maupun daerah, dunia usaha, swasta, dan masyarakat.
- b. KSNP-SPP meliputi uraian tentang visi dan misi pengembangan sistem pengelolaan persampahan; isu strategis, permasalahan dan tantangan, pengembangan SPP, tujuan / sasaran; serta kebijakan dan strategi nasional pengembangan sistem pengelolaan persampahan dengan rencana tindak

yang diperlukan. kebijakan dan strategi nasional pengembangan sistem pengelolaan daur ulang sampah Persampahan.

Berkaitan dengan kebijakan pengurangan sampah sejak dari sumbernya dengan program unggulan 3R (*Reuse, Reduce, and Recycle*) serta sasaran yang harus dicapai pada tahun 2014 sebesar 20%". Dalam pelaksanaan pengelolaan sampah 3R (*Reuse, Reduce and Recycle*) Berbasis Masyarakat, terdapat tiga kegiatan yang harus dilakukan secara sinergi dan berkesinambungan, yaitu :

- a. Proses pengelolaan sampah sejak dikeluarkan oleh masyarakat
- b. Proses pemahaman masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan metoda 3R (*Reuse, Reduce and Recycle*)
- c. Proses pendampingan kepada masyarakat pelaku 3R (*Reuse, Reduce and Recycle*)

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, strategi pengelolaan program daur ulang sampah menggunakan konsep 3R (*Reuse, Reduce and Recycle*) akan lebih efektif dan efisien untuk diterapkan di perkotaan maupun di perdesaan.

4. Tahapan Proses Daur Ulang Sampah

Dalam kehidupan apapun yang dilakukan manusia, selalu melalui proses sebelum sampai pada tujuan akhir. Demikian halnya dalam proses daur ulang sampah. Proses pengelolaannya mengalami beberapa tahapan, antara lain :

- a. Mengumpulkan sampah yang akan didaur ulang
- b. Setelah itu memilah sampah berdasarkan jenis-jenis sampah
- c. Sampah yang telah dipilah kemudian dikirim ke tempat daur ulang sampah untuk diproses

Menurut Afifudin (2003 : 102) terdapat tahap-tahap dari kegiatan daur ulang sampah yang dapat kita lakukan:

- a. Mengumpulkan; yakni mencari barang-barang yang telah di buang seperti kertas, botol air mineral, dus susu, kaleng dan lain-lainya.
- b. Memilah; yakni mengelompokkan sampah yang telah dikumpulkan berdasarkan jenisnya, seperti kaca, kertas, dan plastik.
- c. Menggunakan Kembali; Setelah dipilah, carilah barang yang masih bisa digunakan kembali secara langsung. Bersihkan terlebih dahulu sebelum digunakan.

- d. Mengirim; Kirim sampah yang telah dipilah ke tempat daur ulang sampah, atau menunggu pengumpul barang bekas keliling yang akan dengan senang hati membeli barang tersebut.
- e. Melakukan Daur Ulang Sendiri; Jika mempunyai waktu dan ketrampilan kenapa tidak melakukan proses daur ulang sendiri. Dengan kreatifitas berbagai sampah yang telah terkumpul dan dipilah dapat disulap menjadi barang-barang baru yang bermanfaat.

Semua orang dapat berpartisipasi dalam proses daur ulang sampah, paling tidak pada dua tahap (proses) awal daur ulang yakni mengumpulkan dan memilah sampah yang dapat dilakukan setiap saat.

5. Program Daur Ulang Sampah Sebagai Bentuk Kegiatan PLS

Pendidikan luar sekolah atau pendidikan nonformal terdapat pada setiap kehidupan masyarakat, baik pada masyarakat maju maupun masyarakat berkembang. Pendidikan luar sekolah bukan produk baru atau sebagai inovasi, tetapi sudah sejak manusia dilahirkan. Perkembangan Pendidikan luar sekolah telah mendapatkan perhatian sejak tahun 1950-an. Pengertian pendidikan luar sekolah itu sendiri menurut Djuju Sudjana (2000 : 45) sebagai berikut :

Setiap kesempatan dimana terdapat komunikasi yang teratur dan terarah diluar sekolah dan seseorang mendapat informasi, pengetahuan, latihan maupun bimbingan sesuai dengan usia dan kebutuhan hidupnya dengan tujuan mengembangkan tingkat keterampilan, sikap dan nilai yang memungkinkan baginya menjadi peserta yang efisien dan efektif dalam lingkungan keluarganya, pekerjaannya, bahwa lingkungan masyarakat dan negaranya.

Selanjutnya dalam pasal 31 Peraturan Pemerintah RI No.66 Tahun 2010 tentang perubahan atas PP No.17/2010 tentang pendidikan luar sekolah, dikemukakan bahwa “Jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang”, sedangkan Coombs dalam Mustofa Kamil (2009 : 14) menyatakan :

Pendidikan nonformal adalah setiap kegiatan yang terorganisasi, diselenggarakan di luar pendidikan persekolahan, diselenggarakan secara tersendiri atau merupakan bagian penting dari suatu kegiatan yang lebih luas dengan maksud memberikan layanan khusus kepada warga belajar di dalam mencapai tujuan belajar.

Pengungkapan istilah pendidikan nonformal memberikan informasi bahwa pada hakikatnya pendidikan tidak hanya diselenggarakan dalam pendidikan formal saja, tetapi juga dalam pendidikan nonformal dan informal. Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan pendidikan luar sekolah dilakukan secara terprogram, terencana, dilakukan secara mandiri ataupun merupakan bagian pendidikan yang lebih luas untuk melayani peserta didik dengan tujuan mengembangkan kemampuan-kemampuan seoptimal mungkin mencapai kebutuhan hidupnya.

b. Tujuan pendidikan Luar Sekolah

Pendidikan luar sekolah pada prinsipnya memiliki tujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia dalam kualitas dan potensi dirinya melalui pendidikan yang berlangsung sepanjang hayat. Pendidikan nonformal selalu terkait dengan norma tertentu, fakta empiris pendidikan nonformal selalu syarat nilai dalam arti bahwa setiap fakta selalu ditafsirkan dengan mengacu pada norma tertentu serta dalam konteks tujuan tertentu. Sehubungan hal itu Sutaryat T dalam Mustofa Kamil (2009:27-28) menyimpulkan bahwa :

- 1) Interaksi sosial budaya antara warga belajar dan sumber belajar mengandung arti, proses pendidikan itu berlangsung secara sadar, dengan diwujudkan melalui media tertentu dan situasi lingkungan tertentu, dapat ditinjau dari aspek mikro dan aspek makro, syarat makna dan nilai serta terarah pada pengembangan kemandirian melalui proses belajar sepanjang hayat.
- 2) Tujuan pendidikan nonformal yang ingin dicapai melalui interaksi tersebut terkandung makna pengembangan manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan, jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Dengan demikian tujuan daripada pendidikan nonformal mencakup pelayanan terhadap warga belajar, pembinaan warga belajar, dan memenuhi kebutuhan warga belajar dan masyarakat yang tidak terpenuhi melalui jalur pendidikan formal.

c. Peran Pendidikan Luar Sekolah Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Kontribusi pendidikan nonformal dalam pemberdayaan masyarakat, secara lebih jelas dapat dilihat dari definisi dan hakekat peran pendidikan nonformal itu sendiri. Sehubungan dengan hal tersebut Fasli Jalal dalam Mustofa Kamil (2009 : 90) menyatakan :

Ada beberapa kesamaan peran kesamaan peran pendidikan noformal dan pendidikan sosial dalam memberdayakan masyarakat. Kesamaan peran tersebut dapat dilihat dari: (a) hakekat pendidikan nonformal adalah membelajarkan masyarakat yang dilakukan di luar sistem pendidikan formal, (b) kegiatan pembelajaran dalam pendidikan nonformal merupakan aktivitas yang disengaja dan diorganisasi secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu, (c) sesuai dengan fungsi pendidikan nonformal sasarannya adalah semua warga masyarakat dalam membantu membelajarkan(pemerataan pendidikan), dan (d) bertujuan memberikan bekal pengetahuan, sikap dan ketrampilan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan pengembangan sumber daya manusia sebagai model pembangunan nasional.

Melihat dari definisi pendidikan luar sekolah, tujuan dan peran pendidikan luar sekolah memiliki kesamaan dengan program daur ulang sampah, yaitu kegiatan yang diselenggarakan secara tersendiri / merupakan bagian dari kegiatan yang lebih luas dengan maksud memberikan layanan khusus kepada masyarakat atau warga belajar, bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia dalam kualitas dan potensi diri dan berperan untuk memberdayakan masyarakat dalam keterampilan dan pengetahuan sebagai pembangunan nasional.

B. Konsep Dasar Kesejahteraan Keluarga

Setiap orang dan/atau keluarga disadari atau tidak senantiasa berusaha untuk mewujudkan suatu kehidupan yang sejahtera. Desi Anwar (2002 : 454) menyatakan bahwa : “ Sejahtera adalah aman sentosa dan makmur, selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya)”. Demi untuk mewujudkannya orang rela bekerja dan/atau berkarya untuk memperoleh penghasilan dari pagi sampai sore atau bahkan sampai malam, berkeringat dan/atau melelahkan. Hal ini karena kesejahteraan bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya atau jatuh dari langit, melainkan sesuatu yang harus diperjuangkan.

Kesejahteraan juga berkaitan dengan kualitas hidup seseorang atau keluarga, seperti diungkapkan oleh Elih Sudiapermana (2012 : 176) bahwa : “Kesejahteraan keluarga adalah “kondisi tentang terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dari setiap anggota keluarga secara material, sosial, mental dan spiritual sehingga dapat hidup layak sebagai manusia yang bermanfaat”. Dengan demikian jelaslah bahwa kesejahteraan adalah suatu kualitas hidup seseorang dan/atau keluarga dalam memenuhi segala keperluan hidupnya baik yang lahiriah maupun batiniyah sehingga seseorang dan/atau keluarga terlepas dari kesulitan atau kesukaran. Karena itulah setiap orang berusaha dengan bekerja atau berkarya agar memperoleh penghasilan untuk memenuhi segala keperluan.

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan keluarga

- a. Jumlah anggota keluarga. Pada saat ini tuntutan kebutuhan keluarga semakin meningkat tidak cukup dengan kebutuhan primer (sandang, pangan, papan, pendidikan, dan saran pendidikan) tetapi kebutuhan lainnya seperti hiburan, rekreasi, sarana ibadah, transportasi dan lingkungan yang serasi. Kebutuhan di atas akan lebih memungkinkan dapat terpenuhi jika jumlah anggota dalam keluarga berjumlah kecil.
- b. Tempat tinggal. Suasana tempat tinggal sangat mempengaruhi kesejahteraan keluarga. Keadaan tempat tinggal yang diatur sesuai dengan selera keindahan penghuninya, akan lebih menimbulkan suasana yang tenang dan mengembirakan serta menyejukkan hati.
- c. Keadaan Sosial Keluarga. Untuk mendapatkan kesejahteraan keluarga alasan yang paling kuat adalah keadaan sosial dalam keluarga. Keadaan sosial dalam keluarga dapat dikatakan baik atau harmonis, bilamana ada hubungan yang baik dan benar-benar didasari ketulusan hati dan rasa kasih sayang antara anggota keluarga. Manifestasi daripada hubungan yang benar-benar didasari ketulusan hati dan rasa penuh kasih sayang, nampak dengan adanya saling hormat, menghormati, toleransi, bantu-membantu dan saling mempercayai.

- d. Keadaan ekonomi keluarga. Ekonomi dalam keluarga meliputi keuangan dan sumber-sumber yang dapat meningkatkan taraf hidup anggota keluarga. Dalam hal ini Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (2002:18-21) menyimpulkan: “Semakin banyak sumber-sumber keuangan/pendapatan yang diterima, akan semakin meningkatkan taraf hidup keluarga”. Adapun sumber-sumber keuangan/ pendapatan dapat diperoleh dari menyewakan tanah, pekerjaan lain diluar berdagang, dsb.
- e. Faktor Eksternal Keluarga. Kesejahteraan keluarga perlu dipelihara dan terus dikembangkan, agar tidak terjadi kegoncangan dan ketegangan jiwa diantara anggota keluarga . Karena hal ini dapat menggagu ketentraman dan kenyamanan kehidupan dan kesejahteraan keluarga. Berdasarkan uraian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan keluarga terdapat 2 faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal dalam keluarga.

2. Tingkatan-Tingkatan Kesejahteraan Keluarga

Pada kenyataannya setiap orang dalam masyarakat tidak memiliki kesempatan dan keberuntungan yang sama dalam mewujudkan impiannya. Hal tersebut dapat pula menjadi sarana agar tumbuhnya suasana saling menyayangi antara orang yang kaya dan yang miskin, atau antara yang satu dengan yang lain dapat saling memberi manfaat dalam kehidupannya. Menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (2002 : 12-14) : “Ada beberapa tahapan atau kategori keluarga sejahtera, sebagai berikut : a. Keluarga Pra Sejahtera (Pra KS), b. Keluarga Sejahtera I (KS 1), c. Keluarga Sejahtera II (KS 2, d. Keluarga Sejahtera III (KS 3), e. Keluarga Sejahtera Tahap 3 Plus (KS 3 Plus)”

Penjelasan lebih lanjut pengertian dari pada tingkatan kesejahteraan tersebut di atas adalah ;

- a. Keluarga Pra Sejahtera (PS) , yaitu keluarga yang belum memenuhi kebutuhan dasarnya (basic needs) secara minimal, seperti kebutuhan melaksanakan agama, pangan, sandang, papan dan kesehatan.

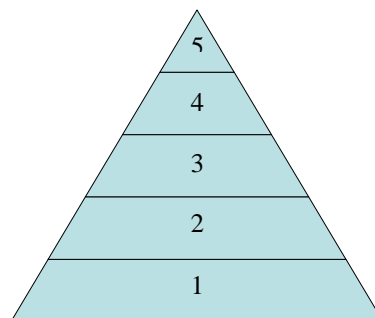
- b. Keluarga Sejahtera Tahap 1 (KS I), yaitu keluarga yang telah memenuhi kebutuhan dasar secara minimal , tetapi belum terpenuhi salah satu kebutuhan sosial psikologi seperti kebutuhan pendidikan, Keluarga Berencana, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal dan transportasi. Indikator keluarga sejahtera tahap I meliputi : Melaksanakan ibadah, makan dua kali atau lebih sehari, memiliki pakaian berbeda untuk aktivitas berbeda, bagian terluar lantai bukan terbuat dari lantai.
- c. Keluarga Sejahtera Tahap II, yaitu keluarga-keluarga yang disamping telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, juga telah memenuhi seluruh kebutuhan sosial psikologinya, akan tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan perkembangannya (development needs) seperti kebutuhan untuk menabung dan memperoleh informasi. Indikator Keluarga Sejahtera Tahap II meliputi : Melaksanakan ibadah secara teratur, daging/ikan/telur 1x seminggu, memiliki satu stel pakaian baru per tahun, luas lantai ≥ 8 m²/jiwa, keluarga berada dalam keadaan sehat 3 bulan terakhir, punya penghasilan tetap, usia 10-60 tahun bisa baca tulis huruf latin, usia 6-15 tahun bersekolah, anak >2 ber KB.
- d. Keluarga Sejahtera Tahap III, yaitu keluarga yang telah memenuhi seluruh kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikologis dan kebutuhan perkembangannya, namun belum dapat memberikan sumbangan (kontribusi) yang maksimal terhadap masyarakat, seperti secara teratur memberikan sumbangan dalam bentuk material dan keuangan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan serta berperan serta secara aktif dengan menjadi pengurus lembaga kemasyarakatan atau yayasan-yayasan sosial, keagamaan, kesenian, pendidikan dan sebagainya. Indikator Keluarga Sejahtera Tahap III meliputi : Meningkatkan pengetahuan agama, memiliki tabungan keluarga, makan bersama sambil berkomunikasi, mengikuti kegiatan masyarakat, rekreasi selama 6 bulan sekali, menggunakan sarana transportasi.

- e. Keluarga Sejahtera Tahap III Plus, yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhannya, baik yang bersifat dasar, sosial psikologis maupun yang bersifat pengembangan, serta telah dapat pula memberikan sumbangan yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat. Indikator Keluarga Sejahtera Tahap III Plus meliputi : Memberikan sumbangan materi secara teratur, aktif sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan.
- f. Berdasarkan uraian di atas, tingkatan-tingkatan kesejahteraan keluarga meliputi keluarga pra sejahtera (Pra KS), keluarga sejahtera tahap 1 (KS I), keluarga sejahtera tahap II (KS II), keluarga sejahtera tahap III, keluarga sejahtera tahap III Plus.

3. Pengaruh Kesejahteraan Terhadap Kualitas Hidup Manusia

Dalam upaya pemenuhan kebutuhannya memiliki tujuan dan harapan untuk segera terwujud. Tujuan dan harapan hidup manusia secara lahiriah biasanya berhubungan dengan upaya mewujudkan kondisi kehidupan diri dan keluarga yang terbebas dari kemiskinan dan kekurangan, kelaparan, sakit yang tidak mampu berobat, anak yang tidak dapat sekolah, dan sebagainya.

Kebutuhan yang berkaitan dengan upaya manusia untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupannya disebut kebutuhan manusia. Abraham H. Maslow dalam Djuju Sudjana (2010:167), menjelaskan : “Lima tingkatan kebutuhan yang harus dan dapat dipenuhi oleh manusia dalam mempertahankan dan mengembangkan kehidupannya”. Lima tingkatan itu dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Tingkatan kebutuhan Hidup Manusia

Keterangan :

5 = kebutuhan aktualisasi diri (*self actualization need*)

4 = kebutuhan penghargaan (*esteem need*)

3 = kebutuhan sosial (*social need*)

2 = kebutuhan rasa aman (*safety need*)

1 = kebutuhan fisiologis/dasar (*physiological need*).

Dengan demikian semakin tinggi kesanggupan seseorang dalam memenuhi seseorang, akan semakin terdorong untuk memenuhi kebutuhannya yang lebih tinggi, sehingga akan makin meningkat kualitas kehidupannya. Sebaliknya orang yang tidak sejahtera akan kesulitan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup yang lebih tinggi, sehingga kualitas hidupnya akan sulit kebutuhan hidupnya, maka semakin tinggi pula tingkat kualitas hidup yang diwujudkannya.

4. Peran PLS dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga

Ada beberapa kegiatan atau program PLS yang dapat berperan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, antara lain :

a. Pemberantasan Buta Aksara

Salah satu program yang dikembangkan oleh PLS adalah program keaksaraan fungsional, program ini bertujuan membelajarkan masyarakat (warga belajar) agar dapat memanfaatkan kemampuan dasar baca, tulis, hitung dan kempuan fungsionalnya dalam kehidupan sehari-hari. Program keaksaraan diselenggarakan secara massal dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat dan pemerintah yang memiliki tanggungjawab dalam pembebasan buta aksara. Kesadaran ini didasarkan atas pandangan bahwa terdapat hubungan antara keniraksaraan dengan kemiskinan.

Keniraksaraan diakibatkan oleh kurang memiliki kemampuan keaksaraan. Hal ini berakibat pada kurang mampu mengenal perintah atau petunjuk untuk melahirkan tingkah laku dalam menjawab tuntutan lingkungannya, sehingga menjadi terasing dari dunia sekitarnya. Perubahan kearah memiliki kemampuan keaksaraan menjadi peristiwa yang sangat berarti bagi kehidupan masyarakat (warga belajar). Program keaksaraan fungsional

merupakan wahana pembelajaran untuk kelompok sasaran buta aksara, baik karena tidak dapat mengikuti pendidikan sekolah maupun yang putus pendidikan dasar sebelum waktunya, khususnya pada kelas-kelas awal (1, 2 dan 3). Menurut Fasli Jalal dalam Mustofa Kamil (2009 : 92) bahwa:

Beberapa karakteristik warga belajar keaksaraan fungsional yang teridentifikasi diantaranya adalah: (a) kemampuan nalar rendah, (b) minat terhadap pembelajaran sangat rendah, (c) pengalaman dan kebiasaan yang sudah melekat dengan dengan cara- cara lama, (d) mengikuti pembelajaran dengan dengan suka rela tidak dengan dipaksa, (e) tidak memungkinkan mengikuti pendidikan yang teratur dengan jadwal yang ketat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan, bahwa pendidikan luar sekolah sangat dibutuhkan dalam program pemberantasan buta aksara, sehingga terjadi perubahan ke arah memiliki kemampuan keaksaraan yang sangat berarti bagi kehidupan masyarakat.

b. Peningkatan kualifikasi Pendidikan melalui Kejar Paket ABC.

Berdasarkan data Depdiknas Tahun 2006, yang dikemukakan oleh Fasli Jalal dalam Mustofa Kamil (2009 : 104) :

Rendahnya kualitas sumberdaya manusia Indonesia salah satunya diakibatkan oleh tingginya angka putus sekolah, pada level pendidikan dasar dan level pendidikan menengah. Pada tingkat Sekolah Dasar 25% dari jumlah lulusannya tidak melanjutkan ke jenjang (level) yang lebih tinggi atau ke SMP/MTS, begitu pula 50% lulusan SMP/MTS tidak melanjutkan ke jenjang atau level SMA/MA (Depdiknas 2006). Oleh karena program kesetaraan merupakan program yang sangat vital dalam menjawab permasalahan mutu sumberdaya manusia.

Program kesetaraan melingkupi program kelompok belajar paket A setara SD/MI, kelompok belajar paket B setara SMP/MTS dan kelompok belajar paket C setara SMA/MA merupakan program Pendidikan Luar Sekolah. Pelaksanaan pendidikan kesetaraan didukung oleh Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Pasal 26 Ayat (3) yang menyatakan : “ Pendidikan kesetaraan dapat dilaksanakan pada satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis ta’lim, serta satuan pendidikan yang sejenis “. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa program keaksaraan adalah program

pendidikan luar sekolah setara SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/MA yang mencakup program paket A, paket B dan paket C.

c. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal. Menurut Fasli Jalal (2002) dalam Mustofa Kamil (2009:96) bahwa:

Pendidikan bagi anak bukan sekadar meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sebagai bekal menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, akan tetapi untuk mempersiapkan masa depan anak yang penuh tantangan, pendidikan harus memungkinkan anak mengembangkan potensi dirinya, termasuk mengembangkan kecerdasan dan kreativitasnya. Pertumbuhan dan perkembangan anak akan optimal bila pendidikan dilaksanakan sedini mungkin.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun, melalui rangsangan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak.

d. Pendidikan Keterampilan dan Latihan.

Pendidikan keterampilan dan Latihan pada umumnya diberikan oleh Lembaga Kursus dan Pelatihan, yang memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan peningkatan kualifikasi seseorang baik yang sudah bekerja atau pun calon tenaga kerja, sebagaimana diungkapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 (Wisnu Setiawan ; 2010 : 78) sebagai berikut : “Lembaga pelatihan menyelenggarakan program pelatihan kerja dan pelatihan lain untuk meningkatkan kompetensi kerja bagi pencari kerja dan pekerja “. Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengertian kursus dan pelatihan disejajarkan, seolah-olah memiliki pengertian yang sama (Depdiknas ; 2008 : 18) yaitu sebagai berikut : “ Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang

memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi “. Demikian pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Wisnu Setiawan ; 2010 : 77) dikatakan :

Lembaga kursus dan lembaga pelatihan serta bentuk lain yang sejenis menyelenggarakan pendidikan bagi masyarakat untuk :

- a) memperoleh keterampilan kecakapan hidup, b) mengembangkan sikap dan kepribadian profesional, c) mempersiapkan diri untuk bekerja, d) meningkatkan kompetensi vokasional, e) mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri, dan/atau, f) melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

Perbedaan yang paling mendasar antara Kursus dan Pelatihan terletak pada tujuan dan sasaran dari keduanya. Berkenaan dengan Pengelolaan Kursus dan Pelatihan kerja ini kita juga dapat menyimak Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Wisnu Setiawan, 2006 : 1) menjelaskannya ;

Pasal 1.

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

- 1) Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
- 2) Lembaga pelatihan kerja adalah instansi pemerintah, badan hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.
- 3) Pelatihan berbasis kompetensi kerja adalah pelatihan kerja yang menitik beratkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja.

Pernyataan pada pasal-pasal tersebut di atas menunjukkan bahwa program pendidikan luar sekolah ada di setiap Kementerian atau Lembaga Pemerintahan Nonkementerian, dan/atau lembaga swasta, selama mereka memiliki program Pendidikan, Kursus dan Latihan serta bentuk pendidikan lain yang diselenggarakan di luar sistem persekolahan.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Selanjutnya peneliti menetapkan hipotesis Uji sebagai berikut :

H_0 = Tidak terdapat pengaruh dari pengelolaan program daur ulang sampah terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga di lingkungan RW 01 Desa Benteng Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor.

H_1 = Terdapat pengaruh dari pengelolaan program daur ulang sampah terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga di lingkungan RW 01 Desa Benteng Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor.

Sementara itu yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah warga RW 01 yang mengikuti program pengelolaan daur ulang sampah, sebanyak 130 orang di Desa Benteng Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor, sedang yang diangkat menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 30 orang yang dipilih secara acak (random sampling).

Hipotesis yang diajukan perlu dilakukan uji hipotesis agar mendapatkan hasil penelitian yang sempurna dengan menggunakan rumus product moment pearson, sebagai berikut :

a. Uji koefisien korelasi atau uji r :

$$r = \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{[n(\sum x^2) - (\sum x)^2][n(\sum y^2) - (\sum y)^2]}}$$

Keterangan : r = Koefisien korelasi

n = Banyaknya pasangan pengamatan (sampel)

$\sum x$ = Jumlah pengamatan variabel X

$\sum y$ = Jumlah pengamatan variabel Y

$(\sum x^2)$ = Jumlah kuadrat pengamatan variabel X

$(\sum x)^2$ = Kuadrat jumlahan pengamatan variabel X

$(\sum y^2)$ = Jumlah kuadrat pengamatan variabel Y

$(\sum y)^2$ = Kuadrat jumlahan pengamatan variabel Y

$(\sum xy)$ = jumlah hasil kali variabel X dan Y

C. Uji Kebenaran Koefisien Korelasi

Setelah diketahui nilai r , maka untuk menguji signifikansi koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y menggunakan t hitung sebagai berikut :

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan :

t = Nilai t hasil perhitungan

r = Koefisien korelasi

r^2 = Koefisien determinasi

$n-2$ = Derajat bebas

D. Uji Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui persentasi besarnya perubahan variabel berikut yang disebabkan oleh variabel bebas, maka digunakan koefisien determinasi dengan rumus :

$$KD = r^2 \times 100\%$$

Untuk memberikan interpretasi seberapa kuat pengaruh dari mengikuti program pengelolaan daur ulang sampah terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga di RW 01 Desa Benteng kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor.

IV. SIMPULAN.

Berdasarkan hasil analisis dan interpretasi yang telah dilakukan, maka dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh data untuk variabel X (pengelolaan program daur ulang sampah) yaitu bahwa skor tertinggi 116, dan skor terendah 88 dan standar deviasi skor variabel X sebesar 6,35. Hal ini menunjukkan bahwa responden setuju adanya pengelolaan program daur ulang sampah di RW 01 Desa Benteng Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor.
- b. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh data untuk variabel Y (peningkatan kesejahteraan keluarga) yaitu bahwa skor tertinggi 118, dan skor terendah adalah 97 dan standar deviasi skor variabel Y sebesar 5,14. Hal ini

menunjukkan bahwa responden setuju adanya peningkatan kesejahteraan keluarga di RW 01 Desa Benteng Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor.

- c. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh, Nilai t_{hitung} (0,51) yang dikonsultasikan dengan t_{tabel} pada tahap kepercayaan 95 % terletak pada nilai 0,361, dan pada taraf kepercayaan 99 % terletak pada nilai 0,463. Hal ini menunjukkan H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang berarti terdapat pengaruh dari program pengelolaan daur ulang sampah terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga di RW 01 Desa Benteng Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor. Nilai t_{hitung} sebesar 3,14 lebih besar dari t_{tabel} 2,04841, yang berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima.
- d. Harga koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 26 %, berarti pengaruh pengelolaan program daur ulang sampah terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga di RW 01 Desa Benteng Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor sebesar 26 %, sisanya 74 % dijelaskan oleh sebab-sebab lain, diantaranya kondisi sosial ekonomi masyarakat, latar belakang pendidikan, dll.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifudin. (2003) *Sampah dan pengelolaannya, materi diklat TOT PKLH*, Jakarta : Direktorat Dikdasmen.
- Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. (2002) *Penanggulangan Kemiskinan*, Jakarta : BKKBN.
- Chandra. (2006) *Program Pengelolaan Sampah*, Jakarta : Penebar Swadaya.
- Djuju Sudjana. (2010) *Manajemen Program Pendidikan*, Bandung : Falah Production.
- _____. (2010) *Pendidikan Nonformal*, Bandung : Falah Production
- Desi Anwar. (2002) *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya : Amelia
- Depdiknas. (2003) Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta : Umbara.
- Depdiknas. (2006) *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.

- Elih Sudiapermana. (2012) *Pendidikan Keluarga*, Bandung : Edukasia Press.
- Kementrian Pekerjaan Umum. (2006) Permen PU No. 21/PRT/M/2006 *Tentang Kebijakan dan strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan*, Jakarta : Setjen Kementrian PU.
- Margono, S. (2003) *Metodologi Penelitian pendidikan*, Jakarta : Cv Rineka Cipta
- Moch Nazir. (2002) *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Mohamad Soeryani. (2000) *Kepedulian Masa Depan*, Jakarta : Institut Pendidikan dan pengembangan Lingkungan.
- Mustofa Kamil. (2009) *Pendidikan Nonformal dan Informal*, Bandung : Alfabeta
- Sudrajat. (2006) *Mengelola Sampah Kota*, Jakarta : Swadaya
- Sugiyono. (2003) *Statistika Untuk Penelitian*, Bandung : Alfabeta.
- _____. (2010) *Statistika untuk Penelitian*, Bandung : Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. (2002) *Prosedur Penelitian Pendidikan : Suatu pendekatan Praktik*, Jakarta : Bina Aksara.
- _____. (2003) *Prosedur Penelitian Pendidikan : Suatu pendekatan Praktik*, Jakarta : Bina Aksara.
- Teti Suryati. (2009) *Mengolah Sampah Untuk Pupuk Peptisida dan Organik*, Jakarta : Penebar Swadaya.
- Wahyu dan Masduki. (2000) *Petunjuk Praktik membuat Skripsi*, Surabaya : Usaha Nasional.
- Winarno Surachmad. (2001) *Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode dan Teknik*, Bandung : Tarsito.
- Zainal Abidin. (2012) *Metodologi penelitian Pendidikan*, Bogor : Graha Widya Sakti.

